

STRATEGI PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN PADA MASA PANDEMI DI KABUPATEN MAJENE

Ahmad Taufik¹, Tipani Chaminra², Isra Rezky Utami³, Ainia Dzikra Putri
Isnaad⁴, Dian Ekawati Gaffar⁵, Muh Rusman⁶

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar, Indonesia, 90221¹²³⁴⁵⁶

*E-mail: ahmad.taufik@unismuh.ac.id

ABSTRACT

This type of research uses qualitative research with the type of phenomenological research, namely examining a certain phenomenon that exists in society which is carried out in depth to study the background, circumstances, and interactions that occur about the government's strategy in improving food security during the current covid-19 pandemic in the district. Majene. The informant in this study was the secretary of the food security department of Majene Regency. The results of this study indicate that in the development and improvement of food security in Majene Regency, the government prioritizes the function of coordination with various related agencies and also community involvement. This increase in food security is an opportunity to improve the community's economy, so that a stable food industry can be realized that involves the community in managing and developing food security. However, based on the results of the study, realizing that the availability of food is not sufficient, community empowerment activities are carried out by the government / local agencies and provide counseling about food security efforts that can be done at home during this pandemic. One of them is by using the yard of the house to grow crops

Keywords: Government Strategy, Food Security, Covid-19

ABSTRAK

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan tipe penelitian fenomenologi yaitu meneliti suatu fenomena tertentu yang ada dalam masyarakat yang dilakukan secara mendalam untuk mempelajari latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi tentang strategi pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan dimasa pandemic covid-19 saat ini di Kabupaten Majene. Informan dalam penelitian ini ialah sekretaris dinas ketahanan pangan Kabupaten Majene. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengembangan dan peningkatan ketahanan pangan di Kabupaten Majene pemerintah lebih mengedepankan fungsi koordinasi dengan berbagai instansi terkait dan juga keterlibatan Masyarakat. Peningkatan ketahanan pangan ini sebagai ajang untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, sehingga terwujud industry pangan stabil yang melibatkan komunitas Masyarakat dalam mengelola dan pengembangan ketahanan pangan. Namun Berdasarkan hasil penelitian, menyadari bahwa ketersediaan pangan belum memadai maka kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan pemerintah/dinas setempat dan pemberian penyuluhan tentang upaya ketahanan pangan yang bisa dilakukan di rumah selama masa pandemi ini. Salah satunya dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk bercocok tanam.

Kata Kunci: Strategi Pemerintah, Ketahanan Pangan, Covid-19

PENDAHULUAN

Kebijakan pemerintah dalam menjaga pangan merupakan alat untuk membangun kesejahteraan penduduk yang menjadi salah satu tanggung jawab pemerintah dengan masyarakat untuk mencapai pemenuhan hak atas pangan (Kaputra, 2015). Sebagai salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi setiap manusia, perlunya kerjasama yang baik antara petani dan pemerintah untuk dapat mengembangkan produksi dalam wilayah penghasil pangan, dalam jumlah dan keragaman yang cukup, aman dan terjangkau bagi penduduknya. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, maka diperlukan suatu strategi dalam meningkatkan ketahanan pangan.

Pangan adalah kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan. Makanan harus tersedia dalam jumlah, kualitas, aman, beragam, bergizi seimbang, merata dan terjangkau oleh semua orang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan (selanjutnya ditulis UU 18 Tahun 2012) mengamanatkan agar ketahanan pangan nasional dibangun atas kedaulatan pangan dan kemandirian pangan. Indonesia sebagai negara agraria yang juga merupakan negara maritim, memiliki potensi sumber pangan yang relatif melimpah. Oleh karena itu, sumber daya alam yang tersedia perlu dikelola secara optimal untuk kepentingan seluruh masyarakatnya. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka membangun ketahanan pangan nasional yang mandiri, selanjutnya UU 18/2012 mengamanatkan bahwa sumber pasokan pangan berasal dari produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional. Adapun dalam hal sumber penyediaan pangan yang berasal dari produksi pangan dalam negeri dan cadangan pangan nasional belum mencukupi, pangan dapat dipenuhi dengan impor pangan sesuai dengan kebutuhan.

Kasus pneumonia yang tidak diketahui penyebabnya pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei, Cina pada Desember 2019. Penyakit ini berkembang sangat pesat dan telah menyebar ke berbagai provinsi lain di Cina, bahkan menyebar hingga ke Thailand dan Korea Selatan dalam kurun waktu kurang dari satu bulan. Pada 11 Februari 2020, World Health Organization

(WHO) mengumumkan nama penyakit ini sebagai Virus CoronaDisease (Covid-19) yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2, yang sebelumnya disebut 2019-nCoV, dan dinyatakan sebagai pandemik pada tanggal 12 Maret 2020 (Susilo et al., 2017). Berdasarkan laporan WHO, pada tanggal 30 Agustus 2020, terdapat 24.854.140 kasus konfirmasi Covid-19 di seluruh dunia dengan 838.924 kematian (CFR 3,4%). Wilayah Amerika memiliki kasus terkonfirmasi terbanyak, yaitu 13.138.912 kasus. Selanjutnya wilayah Eropa dengan 4.205.708 kasus, wilayah Asia Tenggara dengan 4.073.148 kasus, wilayah Mediterania Timur dengan 1.903.547 kasus, wilayah Afrika dengan 1.044.513 kasus, dan wilayah Pasifik Barat dengan 487.571 kasus. Kasus konfirmasi Covid-19 di Indonesia masih terus bertambah. Berdasarkan laporan Kemenkes RI, pada tanggal 30 Agustus 2020 tercatat 172.053 kasus konfirmasi dengan angka kematian 7343 (CFR 4,3%).

Di daerah miskin dan terpencil di Indonesia, kerawanan pangan telah terjadi bahkan sebelum virus Corona. Sekarang, dengan hilangnya sumber uang dari pengiriman uang dan mata pencaharian di luar pertanian, ketidakamanan akan terjadi dalam skala yang lebih besar, kecuali pendapatan yang hilang dari pertanian dapat diganti. Transfer tunai rumah tangga tidak akan cukup untuk menutupi investasi di muka besar yang diperlukan untuk mendapatkan masukan pertanian. Hingga saat ini, kebijakan ketahanan pangan pemerintah difokuskan untuk menjaga pasokan bahan pangan pokok. Kegiatan tersebut tidak hanya tentang berbagai langkah untuk meningkatkan produksi dalam negeri, tetapi juga langkah-langkah sementara untuk menghapus tarif dan mengurangi persyaratan izin impor non-otomatis (surat persetujuan impor) untuk bahan pangan penting seperti daging sapi dan gula. Misalnya, jika tarif dihapuskan, harga impor barang pertanian masih mungkin akan naik tetapi hanya sebesar 0,65%. Upaya lain termasuk bantuan untuk peternak ayam, peningkatan kredit pertanian dan insentif harga untuk sereal. Menurut pendapat Hutapea (2017) Strategi merupakan respon secara terus menerus maupun adaptif terhadap peluang dan ancaman external serta kekuatan dan kelemahan internal yang membuat dampak dalam perkembangan sebuah organisasi. Kemudian Hunger (2012) memberikan pendapat yang sama mengenai strategi yang dimana menurutnya strategi merupakan tempat sekumpulan dari keputusan manajerial dan merupakan aksi pengambilan

keputusan jangka panjang di suatu perusahaan. Hal tersebut meliputi analisis lingkungan external dan internal, formulasi strategi, implementasi strategi, dan evaluasi dan control. Sementara itu Menurut Nisak (2013) yang menyatakan bahwa “strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, strategi selalu dimulai dari apa yang dapat terjadi dan bukan dimulai dari apa yang terjadi. Terjadinya kecepatan inovasi pasar yang baru dan perubahan pola konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies) Perusahaan perlu mencari kompetensi inti didalam bisnis yang dilakukan.

Namun pilar utama strategi ketahanan pangan berada di tangan petani sendiri krisis tidak hanya akan mempengaruhi konsumsi rumah tangga mereka tetapi juga kemampuan mereka untuk menanam dan memanen tanaman Indonesia hampir sepenuhnya bergantung pada produksi makanan pokok dalam negeri termasuk beras, jagung dan singkong dengan adanya larangan ekspor beras di Vietnam dan India, pemerintah Indonesia harus memastikan petani skala kecil tidak melewatkan musim tanam tahun ini. Hal ini sangat penting mengingat banyak petani yang mungkin menghadapi kesulitan mendapatkan input untuk menanam baik karena kekurangan atau kehilangan remitansi dari anggota keluarga maupun hilangnya upah dari pekerjaan di luar musim tanam. Ketersediaan bahan pangan pokok pada kondisi pandemi memegang peranan penting mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar penduduk. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat pandemi covid -19 berpengaruh pada krisis pangan jika tidak dikelola dengan baik. Di satu sisi pandemi covid-19 menolng pendorong penerapan pembatasan social. Di sisi lain kebutuhan pangan diperkirakan dikonsumsi dalam kuantitas yang sama meskipun aktivitas masyarakat lebih terbatas.

Beberapa penelitian sebelumnya yang relevan untuk membantu penyelesaian permasalahan penulis ialah strategi pemerintah dalam pemenuhan ketahanan pangan di kecamatan wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah penelitian ini menggunakan indikator analisis SWOT yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Kemudian

mendapatkan hasil Strategi pemerintah dalam mencegah terjadinya degradasi lahan dengan memberikan bantuan sarana dan prasarana sebagai kekuatan dari pemerintah dan peluangnya adanya kondisi geografis atau kondisi tanah yang subur di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar. Adapun kelemahannya yaitu kurangnya kesadaran petani dengan adanya peran penyuluh yang dapat mengancam menurunnya hasil produksi pertanian.

Penelitian lain yang masih relevan yaitu: strategi pemerintah daerah dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah (studi pada Kabupaten Majene). Adapun hasil dari penelitian tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Malang melalui Badan Ketahanan Pangan Pelaksana dan Penyuluhan (BKP3) telah berupaya dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah melalui pengembangan lumbung pangan, mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi, membentuk Dewan Ketahanan Pangan, pengembangan desa mandiri pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Malang dalam meningkatkan ketahanan pangan daerah sesuai aspek-aspek ketahanan pangan.

Permasalahan dan Tantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan Indonesia berkelanjutan bersifat multidimensi mencakup aspek ekonomi sosial politik dan lingkungan identifikasi permasalahan dan tantangan tersebut dapat dilakukan melalui analisis penawaran dan permintaan pangan dari sisi penawaran tantangan tersebut diantaranya berupa persaingan pemanfaatan sumber daya alam dampak perubahan iklim global dan dominasi usaha tani skala kecil dari sisi permintaan diantaranya tantangan tersebut adalah pertumbuhan penduduk yang tinggi beserta dinamika karakteristik demografi nya perubahan selera konsumen dan persaingan permintaan komoditas pangan untuk konsumsi manusia pakan dan bahan baku energy.

Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa selama beberapa tahun terakhir secara makro Kabupaten Majene mampu menyediakan pangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan warganya namun kualitas konsumsi pangan rata-rata masyarakat majene masih dibawah rekomendasi para ahli gizi maka dari itu kami selaku penulis tertarik untuk mengkaji Seperti apa bentuk strategi pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan di kabupaten majene juga bagaimana

mengatasi kerawanan pangan di Kabupaten Majene melalui koordinasi dinas ketahanan pangan dengan beberapa instansi terkait dan masyarakat dalam menangani kerawanan pangan di Kabupaten Majene.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dituangkan secara diskriptif. metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh objek penelitian seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistic dan dengan cara diskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus dengan memanfaatkan berbagai metode.

Penelitian ini dilakukan di kabupaten majene Sulawesi barat dan suatu study di dinas ketahanan pangan. dengan objek penelitian adalah peran pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di kabupaten majene Sulawesi barat beserta sumber-sumber lainnya. Dengan melihat masalah-masalah yang terjadi dilapangan, maka penelitian ini akan di fokuskan pada strategi pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan di kabupaten majene Sulawesi barat dengan menggunakan pendekatan teori strategi pemerintah menyatakan bahwa strategi adalah suatu bentuk rencana yang mengintegasikan tujuan-tujuan utama, kebijakan-kebijakan dan rangkaian tindakan dalam suatu organisasi disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai dan adanya campur tangan pemerintah dalam proses perkembangan kegiatan pembangunan masyarakat yang dapat dilakukan dengan dua macam cara yakni operasi langsung dengan pengendalian langsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Majene merupakan salah satu dari 6 kabupaten dalam wilayah Propinsi Sulawesi Barat yang terletak di pesisir pantai barat Propinsi Sulawesi Barat memanjang dari Selatan ke Utara. Letak geografis Kabupaten Majene berada pada antara 20 38' 45" – 30 38' 15" Lintang Selatan dan antara 1180 45' 00" – 1190 4' 45" Bujur Timur, dengan jarak ke ibukota Propinsi Sulawesi Barat (Kota Mamuju) kurang lebih 146 km. Luas wilayah Kabupaten Majene adalah 947,84 km² atau 5,6% dari luas Propinsi Sulawesi Barat yang secara administratif

berbatasan dengan wilayah-wilayah kabupaten Mamuju di sebelah Utara, kabupaten Polewali Mandar dan kabupaten Mamasa di sebelah Timur, Teluk Mandar di sebelah Selatan dan selat Makassar di sebelah Barat. Kabupaten Mejene terdiri atas 8 kecamatan dan 82 desa/kelurahan. Adapun kecamatan – kecamatan tersebut adalah Kecamatan Banggae, Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Pamboang, Kecamatan Sendana, Kecamatan Tammerodo Sendana, Kecamatan Tubo Sendana, Kecamatan Malunda dan Kecamatan Ulumanda.

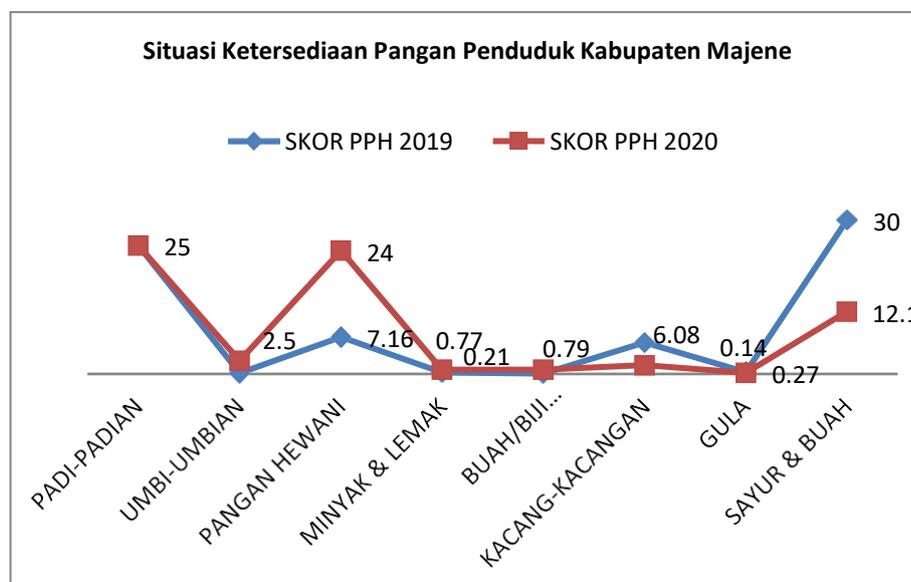
Kecamatan Banggae dan Banggae Timur adalah dua kecamatan dengan luas wilayah terkecil dengan luas wilayah masing-masing 25,15 km² atau 2,65% untuk kecamatan Banggae dan 3,17% dari luas total wilayah Kabupaten Majene untuk kecamatan Banggae Timur. Kecamatan Ulumanda merupakan wilayah kecamatan terluas dibanding dengan luas wilayah kecamatan lainnya yakni; 456,06 km² atau 48,10%, kemudian Kecamatan Malunda dengan luas wilayah 187,85 Km² atau 19,81%.

Menurut catatan Stasiun Meteorologi dan Geofisika, kondisi iklim di Kabupaten Majene sekitarnya sepanjang tahun 2013 sekitar 27,60 C, dengan suhu minimum 24,30 dan suhu maksimum 33,30 C, dengan kelembaban udara berkisar antara 75 persen sampai 82 persen atau rata-rata kelembaban udara berkisar 79 persen. Curah hujan di Kabupaten Majene tertinggi pada bulan Mei sebesar 224,9 mm kubik dengan hari hujan 10. Sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan September sebesar 10,1 mm kubik dengan jumlah hari hujan

Strategi Pemerintah Meningkatkan Ketahanan Pangan Pemberdayaan Ketahanan Pangan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memberikan informasi yang dilakukan secara berkesinambungan dan berkesinambungan mengikuti perkembangan tujuan untuk melakukan perubahan target dalam aspek pengetahuan dari yang tidak terinformasikan untuk mengetahui (pengetahuan), aspek sikap yang dibentuk setelah mengetahui bersedia (sikap), dan aspek tindakan dimana target akan melakukan sesuatu setelah mengetahui dan membentuk sikap (praktik).

Gambar 1. Situasi Ketersediaan Pangan Penduduk Kabupaten Majene (NBM 2020) dibandingkan Pola Pangan Harapan Nasional.



Sumber: Laporan Anali Ketersediaan Pangan Kab Majene 2021

Dari gambar diatas diketahui bahwa ketersediaan energy belum memenuhi standar idealnya dan skor mutu pangan secara keseluruhan berdasarkan situasi pangan di Kabupaten Majene belum sesuai harapan (baru mencapai 71,96 dimana kontribusi energi kelompok Pangan Nabati sebesar 2.531 Kkal (60,16%) sedangkan kontribusi Pangan Hewani hanya mencapai 1.676 Kkal (39,84%). Berdasarkan hasil penelitian, menyadari bahwa ketersediaan pangan belum memadai maka kegiatan pemberdayaan masyarakat dilakukan pemerintah/dinas setempat dan pemberian penyuluhan tentang upaya ketahanan pangan yang bisa dilakukan di rumah selama masa pandemi ini. Salah satunya dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk bercocok tanam.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Majene salah satunya untuk menggelar program Sustainable Food Yard (P2L). Salah satu implementasinya adalah pengembangan Model Area Pekarangan Rumah Pangan Berkelanjutan. Model Kawasan Halaman Rumah Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan memanfaatkan pekarangan milik masyarakat untuk ditanami bahan pangan (selain beras) dan juga dapat digunakan untuk berkembang biak. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan keragaman konsumsi pangan masyarakat yang mengandung gizi seimbang dan sehat untuk dikonsumsi, serta mengurangi

ketergantungan masyarakat terhadap beras. Namun, masyarakat pasif dan lebih memilih mengandalkan pedagang sayur di luar Kabupaten Majene. Strategi Pemerintah dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat sangat ditentukan oleh komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah dengan masyarakat (Hartaman et al., 2021). Keberdayaan masyarakat dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat yang difasilitasi dengan adanya perlakuan atau tindakan pemberdayaan. Indikator sebuah pemberdayaan masyarakat dikatakan berhasil adalah apabila masyarakat tersebut mau ikut berpartisipasi dan pemberdayaan masyarakat tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat (Aidha & Harahap, 2021).

Pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis

Pengembangan sistem agribisnis merupakan bentuk (model, sistem, pola) yang mampu memberikan manfaat bagi pelaku agribisnis (petani/petani/petani/nelayan/usaha kecil dan menengah/koperasi), berupa peningkatan pendapatan, peningkatan nilai tambah dan perluasan kesempatan kerja. Dalam pengembangan sektor agribisnis dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan pasar, diperlukan pengembangan sumber daya agribisnis, khususnya pemanfaatan dan pengembangan teknologi serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) Agribisnis sebagai pelaku pengembangan agribisnis. Untuk mendayagunakan keunggulan, pemerintah harus mengembangkan sistem dan usaha agribisnis berdaya saing (competitiveness), berkerakyatan (people-driven) dan berkelanjutan (sustainable). Pemerintah harus mengembangkan secara sinergis pembangunan sistem agribisnis yang mencakup;

- 1) Subsistem agribisnis hulu (up-stream agribusiness), yakni industri-industri yang menghasilkan barang-barang modal pertanian seperti industri perbenihan/pembibitan, tanaman, ternak, ikan, industri agrokimia (pupuk, pestisida, obat, vaksin ternak/ikan), industri alat dan mesin pertanian (agro-otomotif);
- 2) Subsistem pertanian primer (on-farm agribusiness), yaitu kegiatan budidaya yang menghasilkan komoditi pertanian primer (usahatani tanaman pangan,

hortikultura, tanaman obat- obatan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan),

3) Subsistem agribisnis hilir (down- stream agribusiness), yaitu industri-industri yang mengolah komoditi pertanian primer menjadi olahan seperti industri makanan/ minuman, pakan, barang-barang serat alam, farmasi dan bio-energi.

4) Subsistem penyedia jasa agribisnis (services for agribusiness) seperti perkreditan, transportasi dan pergudangan, Litbang, Pendidikan SDM, dan kebijakan ekonomi (Saragih, 2003).

Sistem agribisnis dan bisnis yang dikembangkan pemerintah, harus berkarakter komunitas yang ditandai dengan keterlibatan masyarakat dalam bisnis sistem dan agribisnis, berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat baik sumber daya alam, teknologi (teknologi adat), kearifan lokal (local wisdom), budaya ekonomi lokal (budaya lokal, modal sosial) dan menjadikan organisasi ekonomi kerakyatan menjadi pelaku utama agribisnis. Selain itu, pengembangan sistem agribisnis dan bisnis juga harus berkelanjutan, baik dari aspek ekonomi, teknologi maupun ekologis. Dalam hal ekonomi, pengembangan sistem dan agribisnis harus berakar pada sumber daya dan organisasi ekonomi lokal dan menjadikan inovasi teknologi dan kreativitas (keterampilan) rakyat yang ramah lingkungan sebagai sumber pertumbuhan, untuk menghasilkan sistem dan bisnis agribisnis yang berkelanjutan (Tantomi, 2020).

Mewujudkan Kebersamaan Antara Masyarakat Sebagai Pelaku dan Pemerintah Sebagai Fasilitator

Makanan adalah kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Sebagai kebutuhan pokok, pangan memiliki arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dari kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi. Pertanian sebagai kegiatan pemenuhan kebutuhan manusia yang paling krusial memiliki tantangan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat selama pandemi. Padahal sektor pertanian sendiri dipengaruhi oleh perekonomian yang tidak baik. Penurunan pendapatan rumah tangga mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat. Masyarakat menjadi lebih selektif dalam membelanjakan uangnya dengan

memprioritaskan membeli kebutuhan pangan yang primer (mendasar). Sinergi yang baik antara pemerintah, masyarakat, akademisi dan seluruh stake holder untuk menjaga kestabilan pemenuhan kebutuhan pangan dan rantai pasokan bahan pangan sangatlah diperlukan Penguatan create supply bahan pangan menjadi tugas yang tidak mudah bagi pemerintah diantara pilihan untuk mengutamakan peningkatan kesehatan masyarakat atau mencegah munculnya krisis pangan karena terganggunya jalur distribusi dan penurunan daya beli masyarakat. Meskipun sulit, tetap harus dilakukan langkah konkrit untuk menjaga ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat khususnya di sector informal yang akan berpengaruh signifikan terhadap ketahanan pangan dan ekonomi secara nasional.

Pembangunan partisipatif harus dimulai dengan masyarakat sebagai manusia yang memiliki aspirasi dan paling mengetahui tentang kebutuhannya. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah daerah harus dapat memposisikan diri sebagai fasilitator untuk menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat yang diharapkan dapat mendukung keberhasilan pembangunan daerah. Pembangunan daerah diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan yang semakin memantapkan ketahanan masyarakat dalam upaya meletakkan dasar dan landasan ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan dan ketahanan nasional. Untuk itu, pembangunan diarahkan kepada kegiatan pengembangan secara terpadu dan menyeluruh dengan cara memperdayakan setiap komponen dimasyarakat dalam rangka meningkatkan pengembangan masing-masing daerah. Dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah dibutuhkan kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat. Selain itu juga diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengarahkan serta membimbing masyarakat guna bersama-sama melaksanakan program pembangunan daerah.

Menumbuhkan ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga dan individu

Ketahanan pangan sebagai terjemahan dari istilah food security merupakan suatu kondisi ketersediaan pangan yang cukup bagi setiap orang, setiap saat dan setiap individu. Konsep ketahanan pangan tersebut dapat diterapkan untuk menyatakan ketahanan pangan pada beberapa tingkatan yaitu, global, nasional, regional, tingkat rumah tangga dan individu mengemukakan bahwa faktor pendapatan,

jumlah anggota keluarga, pendidikan kepala keluarga, dan kemampuan memenuhi kebutuhan pangan berpengaruh terhadap tingkat ketahanan pangan rumah tangga. (Rasmianti et al., 2016). Sistem ketahanan pangan komprehensif Indonesia mencakup empat sub-sistem, yaitu: (i) ketersediaan jumlah dan jenis pangan yang cukup untuk seluruh penduduk, (ii) kelancaran dan pemerataan pangan, (iii) konsumsi pangan setiap individu yang memenuhi kecukupan gizi seimbang, yang berdampak pada (iv) status gizi masyarakat. Dengan demikian, sistem ketahanan pangan dan gizi tidak hanya memperhatikan produksi, distribusi, dan penyediaan pangan di tingkat makro (nasional dan regional), tetapi juga menyangkut aspek mikro, yaitu akses pangan di tingkat rumah tangga dan perorangan serta status gizi anggota rumah tangga, terutama anak-anak dan ibu hamil dari rumah tangga miskin. Ketahanan pangan suatu rumah tangga dapat dilihat dari indikatornya dari pangsa pengeluaran rumah tangga tersebut baik dari pengeluaran pangan dan non pangan. Pengeluaran pangan sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor sosial dan ekonomi. Dari peneliti sebelumnya Sinaga et al., (2017) bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran pangan rumah tangga ialah pendapatan keluarga, jumlah anggota keluarga, pendidikan ibu, jumlah beras raskin yang diterima. Tingkat pengeluaran terdiri dari dua kelompok, yaitu pengeluaran untuk makanan dan bukan makanan. Tingkat kebutuhan / permintaan untuk kedua kelompok pada dasarnya berbeda. Dalam keadaan penghasilan terbatas, kebutuhan pangan diutamakan, sehingga pada masyarakat berpenghasilan rendah akan tampak bahwa sebagian besar pendapatannya digunakan untuk membeli makanan. Faktor pendapatan adalah salah satu faktor penting yang menentukan pola konsumsi rumah tangga. Pendapatan yang lebih tinggi menunjukkan peningkatan daya beli, dan peningkatan aksesibilitas terhadap makanan berkualitas lebih baik. Faktor lain yang juga berperan dalam pengeluaran pangan adalah lingkungan (social access). Semua faktor menentukan kualitas makanan yang dikonsumsi oleh rumah tangga yang pada akhirnya akan menentukan kesejahteraan rumah tangga hingga ketahanan pangan.

Pemantapan koordinasi dan sinkronisasi pihak-pihak terkait dalam perencanaan, kebijakan, pembinaan dan pengendalian

Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan. Rapat dewan ketahanan pangan merupakan forum koordinasi para anggota dewan ketahanan pangan untuk melaksanakan kebijakan program pembangunan pangan. Sektor pertanian menjadi sorotan karena erat kaitannya dengan ketahanan pangan nasional. Tentunya di saat pandemi sulit seperti saat ini ketahanan pangan menjadi sesuatu yang harus diupayakan untuk menghindari krisis pangan. Ketahanan pangan sendiri memiliki dua kata kunci penting, yaitu ketersediaan pangan yang memadai dan merata serta akses penduduk terhadap pangan, baik secara fisik maupun ekonomi. Ketahanan pangan kita secara umum dapat dikatakan terganggu. Selama pandemi ini, pemerintah telah menerapkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di beberapa daerah, masyarakat juga diminta mengurangi kontak fisik dan melakukan work from home. Hal ini dapat mempengaruhi produksi, distribusi, dan juga konsumsi makanan. Sarana untuk mendistribusikan makanan menjadi terbatas sehingga ada kurangnya produktivitas pangan. Selain itu, dengan perubahan gaya hidup masyarakat, otomatis permintaan masyarakat sebagai konsumen pangan juga berubah. Permasalahan yang paling besar terjadi pada distribusi pangan yaitu Dengan adanya pembatasan-pembatasan, distribusi pangan menjadi lemah. Akibatnya, stok pangan tidak merata di semua daerah. Ada daerah yang mengalami defisit dan ada pula yang mengalami produksi berlebih (Lestari, 2021).

Petani sebagai kunci pangan Indonesia selama pandemi diharapkan tetap sehat dan bekerja dengan maksimal pemerintah harus mengambil langkah-langkah untuk mencegah krisis pangan (Fadillah et al., 2021). Mulai dari kesejahteraan petani melalui pendampingan dan fasilitas seperti bantuan relaksasi kredit kepada petani miskin. Petani juga harus diperkenalkan dengan teknologi untuk membantu mereka dalam mendistribusikan dan menjaga stabilitas harga produk pangan

selama pandemi seperti ini. pemerintah juga dinilai perlu memetakan potensi pertanian yang ada, menstabilkan harga pangan, mengkonsolidasikan lahan pertanian, dan juga membuat regulasi terkait masalah pangan yang ada (Gustiawan, 2020).

Selain peran pemerintah, masyarakat juga dapat berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan agar terhindar dari krisis pangan. Masyarakat berkesempatan membangun kedaulatan dan kemandirian pangan. Di masa pandemi ini, masyarakat cenderung lebih kreatif dan bisa kreatif untuk menghindari situasi. Termasuk menjaga akses makanan. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk melakukan penanaman diri minimal untuk memenuhi kebutuhan pangannya sendiri. Ada banyak sekali cara untuk melakukan penanaman mandiri seperti misalnya urban farming dan juga melakukan penanaman dengan metode hidroponik dengan memanfaatkan lahan-lahan yang ada di rumah. Dinas ketahanan pangan di Kabupaten majene sendiri lebih mengedepankan fungsi koordinasi dengan dinas-dinas lain yang terkait. Setiap tahunnya dinas ketahanan pangan mengadakan rapat minimal sekali dalam setahun, Di dalam rapat koordinasi itu masing masing dinas yang terkait mengemukakan rencana rencananya sehubungan dengan penyelenggaraan ketahanan pangan. Dinas ketahanan pangan mempunyai 3 komponen utama mulai dari segi ketersediaan pangan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Ketersediaan pangan berhubungan langsung dengan suplei yang ada dilapangan atau dari petaninya itu sendiri. Kemudian akses pangan ini lebih kepada kemampuan daya beli masyarakat terhadap produk pangan. Serta pemanfaatan pangan lebih ke arah pola konsumsi pangan masyarakat.

KESIMPULAN

1. Pemberdayaan Ketahanan Pangan Masyarakat adalah upaya pemberian informasi yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan mengikuti perkembangan sasaran untuk membuat sasaran berubah dalam aspek pengetahuan dari yang tidak tahu menjadi tahu (knowledge), aspek sikap terbentuk setelah tahu menjadi mau (attitude), dan aspek tindakan

dimana sasaran akan melakukan sesuatu setelah tahu dan terbentuk sikap (practice).

2. Pengembangan Sistem dan Usaha Agribisnis adalah merupakan suatu bentuk (model, sistem, pola) yang mampu memberikan keuntungan bagi pelaku-pelaku agribisnis (petani/peternak/pekebun/ nelayan/pengusaha kecil dan menengah/koperasi), dalam bentuk peningkatan pendapatan, peningkatan nilai tambah dan perluasan kesempatan kerja. Dalam pengembangan sektor agribisnis agar dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan pasar diperlukan pengembangan sumber daya agribisnis, khususnya pemanfaatan dan pengembangan teknologi serta pembangunan kemampuan sumber daya manusia (SDM) Agribisnis sebagai aktor pengembangan agribisnis.
3. Mewujudkan Kebersamaan Antara Masyarakat Sebagai Pelaku dan Pemerintah Sebagai Fasilitator. Pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Sebagai kebutuhan dasar, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidakstabilan ekonomi.
4. Menumbuhkan ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga dan individu. Ketahanan pangan sebagai terjemahan dari istilah food security merupakan suatu kondisi ketersediaan pangan yang cukup bagi setiap orang, setiap saat dan setiap individu. Konsep ketahanan pangan tersebut dapat diterapkan untuk menyatakan ketahanan pangan pada beberapa tingkatan yaitu, global, nasional, regional, tingkat rumah tangga dan individu
5. Pemantapan koordinasi dan sinkronisasi pihak-pihak terkait dalam perencanaan, kebijakan, pembinaan dan pengendalian. Berdasarkan tugas dan fungsi Badan Ketahanan Pangan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan. Rapat dewan ketahanan pangan merupakan forum koordinasi para anggota dewan ketahanan pangan untuk melaksanakan kebijakan program pembangunan pangan.

REFERENSI

- Aidha, Z., & Harahap, R. A. (2021). Pemberdayaan masyarakat dalam upaya ketahanan pangan selama pandemi COVID-19 di Kecamatan Bilah Barat. *Tropical Public Health Journal*, 1(1), 22–30.
- Fadillah, A. N., Sisgianto, & Mohammad Jafar Loilatu. (2021). The Urgency of Food Estate for National Food Security in The Middle of The COVID-19 Pandemic. *Journal of Government and Political Issues*, 1(1), 35–44.
<https://doi.org/10.53341/jgpi.v1i1.8>
- Gustiawan. (2020). Strategi Pertanian Menghadapi Pandemi Covid-19. *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/opini/308928/strategi-pertanian-menghadapi-pandemi-covid-19>
- Hartaman, N., Wahyuni, W., Nasrullah, N., Has, Y., Hukmi, R. A., Hidayat, W., & Ikhsan, A. A. I. (2021). Strategi Pemerintah Dalam Pengembangan Wisata Budaya Dan Kearifan Lokal Di Kabupaten Majene. *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(2 SE-Articles).
<https://doi.org/10.37329/ganaya.v4i2.1334>
- Hunger, D. J. (2012). *Strategic management and business policy*. Pearson Education.
- Hutapea, B. O. (2017). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Kawasan Wisata Muara Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara Tahun 2015. *JOM Fisip*, 4 (1).
- Kaputra, I. (2015). Alih fungsi lahan, pembangunan pertanian dan kedaulatan pangan. *Jurnal Strukturisasi*, 1(1), 25–39.
- Lestari, P. (2021). Ketahanan Pangan Indonesia selama Pandemi: Apa yang Bisa Dilakukan untuk Memperbaikinya? *Msn.Com*. <https://www.msn.com/id-id/ekonomi/ekonomi/ketahanan-pangan-indonesia-selama-pandemi-apa-yang-bisa-dilakukan-untuk-memperbaikinya/ar-BB1cU4pw%0A%0A>

- Nisak, Z. (2013). Analisis SWOT untuk menentukan strategi kompetitif. *Jurnal Ekbis*, 9(2), 468–476.
- Saragih, B. (2003). Pembangunan sistem agribisnis di indonesia dan Peranan public relation. *SOCA: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 1(2), 43844.
- Sinaga, R. J. R., Lubis, S. N., & Darus, M. B. (2017). Kajian faktor-faktor sosial ekonomi masyarakat terhadap ketahanan pangan rumah tangga di Medan. *Journal of Agriculture and Agribusiness Socioeconomics*, 2(5), 15067.
- Tantomi, I. (2020). Jaga Ketahanan Pangan di Masa Pandemi COVID-19, Begini Upaya Pemerintah. *Merdeka.Com*. <https://www.merdeka.com/uang/jaga-ketahanan-pangan-di-masa-pandemi-covid-19-begini-upaya-pemerintah.html>